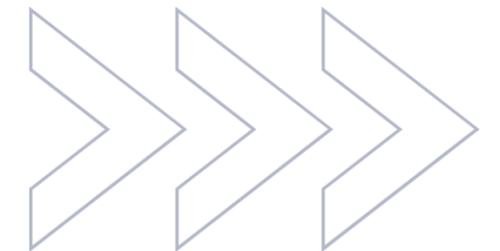




**FOCUS GROUP DISCUSSION**

**Mekanisme Pembiayaan  
Efisiensi Energi:  
Pengembangan Mekanisme  
yang Inovatif dan  
Berlandaskan Kondisi  
Lintas Sektor di Indonesia**

**Jakarta, 6 Mei 2024**



# Transisi Energi di Indonesia

## Definisi (berdasarkan RUU EBET)

“Transisi energi adalah proses transformasi penyediaan dan pemanfaatan Energi Tak Terbarukan menjadi Energi Baru dan Energi Terbarukan, penggunaan teknologi energi rendah karbon dan/atau efisiensi energi secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca”

## Komitmen dan Aktivitas



“Komitmen pencapaian **Net Zero Emission** tahun 2060 atau lebih cepat”

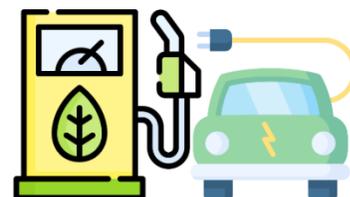
Melalui:



Pengembangan PLT EBT



Phase Out PLT Fosil



Implementasi EV dan Biofuel



Peningkatan efisiensi energi sektor demand

Others

## Dasar Hukum

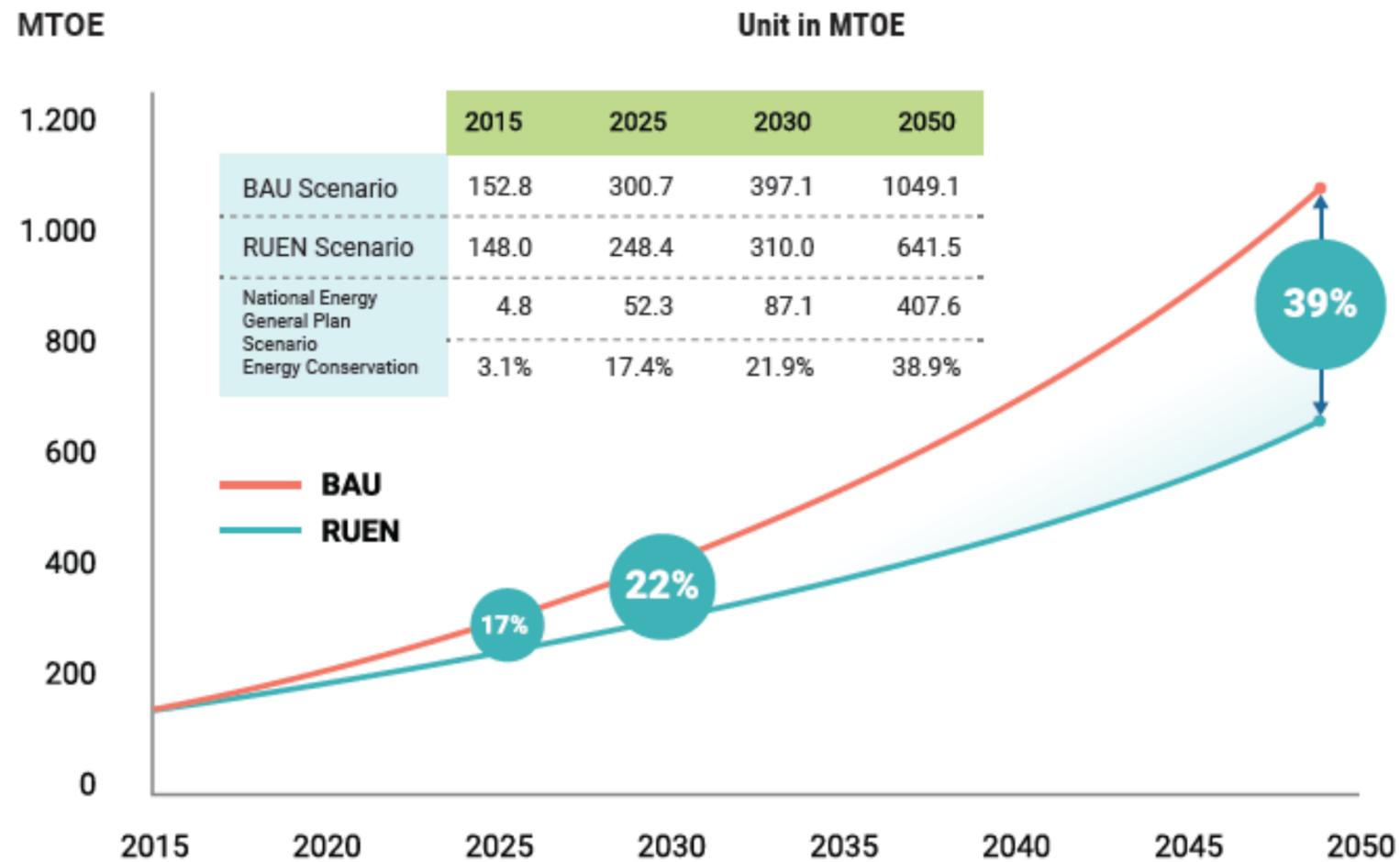
1. UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi
2. PP No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional
3. UNFCCC – COP21, Desember 2015 – *Paris Agreement*  
Menurunkan emisi GRK 29% dari BaU (kemampuan sendiri) atau 41% (dengan bantuan internasional) pada 2030 sesuai NDC → enhanced NDC 358 Juta Ton CO<sub>2</sub>
2. COP 26, 2 November 2021: Indonesia akan mampu berkontribusi dalam percepatan perwujudan global *Net-Zero Emission*.
3. Dokumen LTS-LCCR, KLHK 2021
4. Dokumen Indonesia Energy Transition Outlook, IESR 2021
5. Dokumen *An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia, IEA2022*
6. *Dokumen Indonesia Energy Transition Outlook, IRENA 2022*
7. *Presidensi G20 – “Recover Together, Recover Stronger”*  
Fokus 3 isu utama: Kesehatan global yang inklusif, Transformasi ekonomi berbasis digital, **transisi menuju energi yang berkelanjutan**
8. **Perpres No. 112 Tahun 2022** tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
9. **Inpres RI No. 7 Tahun 2022** tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. **Kepmen Keuangan No. 275 tahun 2022** tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan untuk Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan
11. **Perpres No. 11 Tahun 2023** tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan
12. **Permen ESDM No. 1 Tahun 2023** sebagai Pengganti atas **Permen ESDM No. 13 Tahun 2020** tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
13. **Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023** tentang **Konservasi Energi**
14. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023** tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan

# Latar Belakang Efisiensi Energi di Indonesia

Pengamanan dan target upaya efisiensi energi di Indonesia:

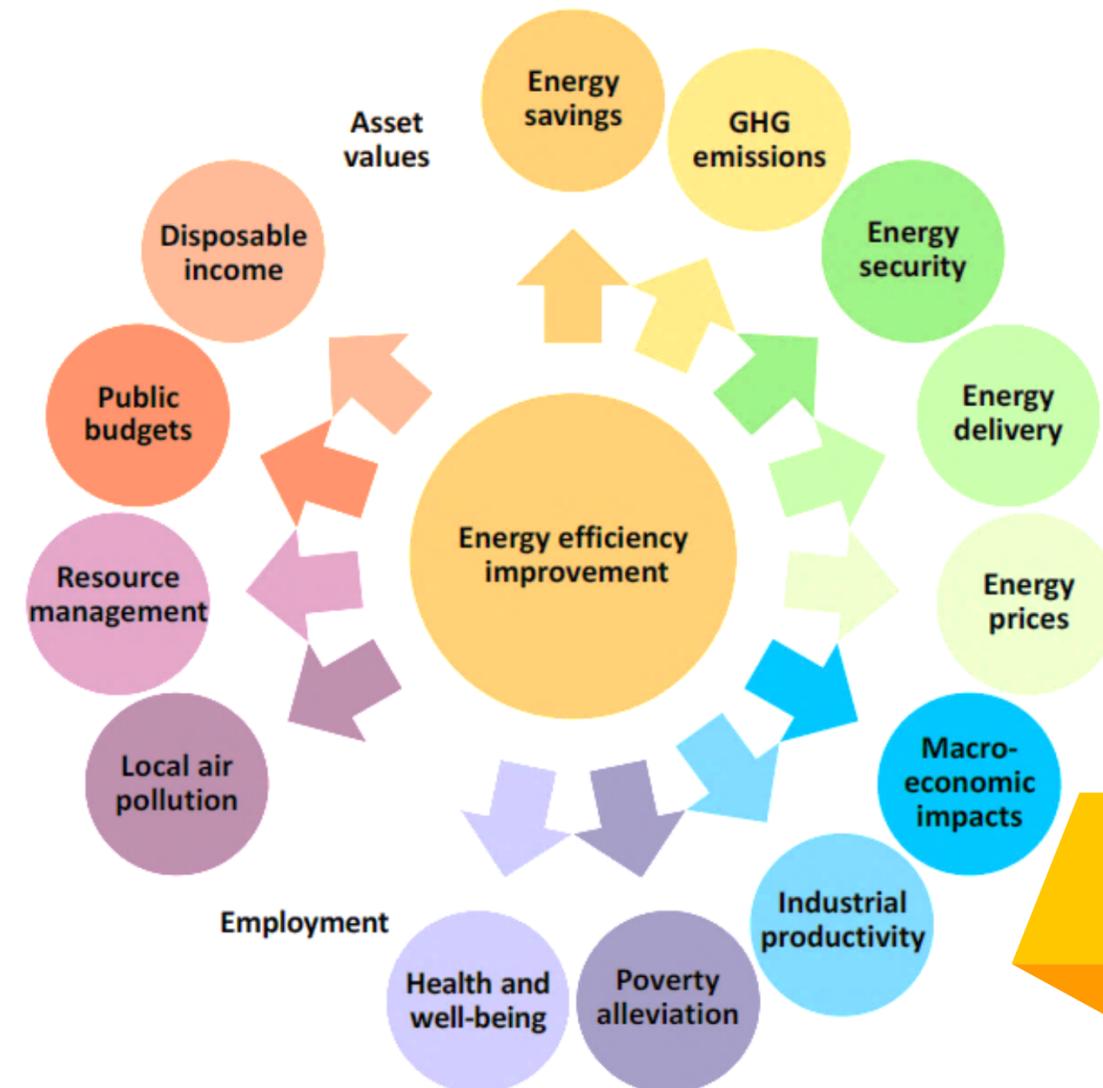
- **Peraturan Presiden 22/2017** tentang RUEN: Mandat penurunan intensitas energi 1%/tahun hingga 2025 dan penurunan konsumsi energi final atau konservasi energi sebesar 17,4% pada tahun 2025 dan 38,9% pada tahun 2050; dan
- **Peraturan Pemerintah 33/2023** tentang Konservasi Energi.

## Target Efisiensi Energi



Sumber: PP No. 22/2017 tentang RUEN

## Manfaat Efisiensi Energi



Sumber: IEA (2023)

# Isu Utama Efisiensi Energi di Indonesia

1. Kebutuhan pengembangan kebijakan untuk mendorong **pasar efisiensi energi** di Indonesia, seperti:
  - regulasi termasuk penegakan hukum terkait efisiensi energi;
  - peningkatan kesadaran dan edukasi tentang efisiensi energi, dan;
  - produk keuangan untuk mendukung pembiayaan efisiensi energi.
2. Konteks **tata kelola** efisiensi energi di Indonesia cenderung tersegmentasi. Tidak ada satu lembaga khusus yang mengemban otoritas dan tanggung jawab penerapan efisiensi energi di Indonesia.
3. Perlunya **lesson learned** dari berbagai praktik-praktik internasional seperti di Mexico, China, dan Turki (untuk skema pembiayaan dan dukungan pasar efisiensi energi); serta Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Saudi Arabia, dan India (untuk kasus penerapan model ESCOs).



# Agenda FGD

## Sesi 1

- Komitmen dan rencana Indonesia terkait efisiensi energi, dan pengembangan pasar sektor ketenagalistrikan – **Kementerian PPN/Bappenas**
- Kerangka kebijakan dan pengembangan efisiensi energi dan ESCOs di Indonesia – **Kementerian ESDM**
- Pemaparan Studi: Synthesis Study on the Effectiveness of Energy Efficiency Financing Mechanism to Support the Energy Transition in Indonesia – **CASE Indonesia**

## Sesi 2

- Peran APBN dalam pendanaan efisiensi energi – **Kementerian Keuangan**
- Mekanisme Pembiayaan serta potensi Penurunan Risiko Investasi Proyek Efisiensi Energi – **PT SMI**
- Energy Savings Insurance (ESI) and ESCO business model supporting the Acceleration of Energy Efficiency Development as part of JETP in Indonesia – **OECD CEFIM**
- UOB Energy Efficiency Financing Scheme: U-Energy – **Bank OUB**

# Maksud dan Tujuan FGD

1

Menjaring masukan-masukan terhadap *Synthesis Study on the Effectiveness of Energy Efficiency Financing Mechanisms to Support Energy Transition in Indonesia*

2

Memprakarsai pembahasan menyeluruh atas kondisi eksisting, hambatan yang dihadapi pemangku kepentingan, serta kesempatan terkait pembiayaan efisiensi energi di Indonesia.

3

Mendiskusikan pengembangan dan inovasi mekanisme pembiayaan efisiensi energi di Indonesia yang berangkat dari kondisi aktual yang dihadapi regulator, pelaku Industri, dan lembaga pembiayaan

4

Memfasilitasi dialog dan menjembatani aspirasi pemangku kepentingan lintas sektoral terkait isu efisiensi energi serta aspek pembiayaannya.

# Terima Kasih

**Asisten Deputi Utilitas dan  
Industri Manufaktur**

✉ asdep32.ekon@gmail.com

 [perekonomianRI](#)  [@perekonomianRI](#)  [www.ekon.go.id](#)

